

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Audit Internal**

##### **2.1.1. Pengertian Audit Internal**

Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam **Reding, et al (2009)** bahwa audit internal adalah:

*“An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”*

Dari definisi tersebut dikatakan bahwa departemen, divisi, tim konsultan atau praktisi lainnya merupakan bagian yang penting dalam memberikan jasa asuransi dan konsultansi yang independen dan objektif sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi sehingga dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, Audit internal haruslah menerapkan pendekatan sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Pengertian Audit Internal lainnya dari para ahli yaitu:

Menurut **Pickett (2010)** menyatakan bahwa audit internal adalah

“kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”.

Sementara itu, Menurut **Sukrisno Agoes (2013)** pengertian audit internal dapat diartikan sebagai berikut:

“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Berdasarkan beberapa definisi audit internal di atas, dapat disimpulkan bahwa audit internal haruslah independen dan objektif dalam membantu pihak manajemen untuk memenuhi segala tujuan didalam perusahaan yang kemudian dikembangkan dalam pendekatan yang sistematis dan teratur sehingga manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola dapat dievaluasi dengan baik dan efektif.

### **2.1.2 Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Menurut **Hiro Tugiman (2006)** tujuan audit internal untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Sementara itu, menurut **Arens et al (2008)** menyebutkan bahwa audit internal diharapkan memberikan nilai bagi organisasi melalui peningkatan efektivitas operasional, sementara juga melakukan tanggung jawab tradisional, seperti meninjau keandalan dan integritas informasi, memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan peraturan, dan mengamankan aset.

Dari pernyataan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal dapat membantu para anggota organisasi khususnya manajemen agar dapat meningkatkan nilai bagi organisasi. Tujuan tersebut didasarkan pada pemeriksaan internal, penilaian, dan pengawasan yang sesuai dengan kepatuhan, kebijakan dan peraturan yang ada di dalam perusahaan.

Menurut **Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal** dalam bukunya **Standar Profesi Audit Internal (2004)**, berdasarkan hasil penilaian resiko, Fungsi Audit Internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem Pengendalian Internal, yang mencakup *governance*, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi. Evaluasi sistem pengendalian internal harus mencakup :

1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi
2. Keandalan dan integritas informasi
3. Keandalan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pengamanan aset organisasi

Definisi ruang lingkup audit internal menurut **Hiro Tugiman (2006)** adalah menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kegiatan kelengkapan dan keefektifan system pengendalian internal yang dimiliki organisasi serta kualitas dan tanggung jawab pelaksanaan yang diberikan”.

Sedangkan, menurut *International Professional Practices Framework (IPPF)* dalam **The Institute of Internal Auditors (2009)**:

*“The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach”.*

Pernyataan dari ruang lingkup audit internal tersebut adalah audit internal harus mampu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengelolaannya.

Lingkup penugasan audit internal, yaitu:

1. Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2. Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

3. Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.

- b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
- c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat dalam organisasi.
- d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawasan, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

### 2.1.3 Standar Audit Internal

Audit internal diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya. organisasi pastinya memiliki berbagai macam ragam tujuan, ukuran, kompleksitas, dan struktur oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal pada setiap lingkungannya, kesesuaian terhadap Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari **The Institute of Internal Auditors** (selanjutnya disebut “Standar”) (2016) merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal.

Tujuan Standar adalah untuk:

1. Memberikan panduan untuk pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Internasional (*International Professional Practices Framework*).
2. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan audit internal yang bernilai tambah.

3. Menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja audit internal.
4. Mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi.

Menurut **standar IIA** dapat disimpulkan bahwa Standar Audit Internal meliputi

1. Standar Atribut yaitu Standar yang mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal. Isi dari standar atribut mencakup:

- a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung

aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal, dan harus sesuai dengan Misi audit internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Internasional (Prinsip Pokok Praktik Profesional audit internal, Kode Etik, Standar dan Definisi audit internal). Kepala audit internal (KAI) harus mengkaji secara periodik piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk memperoleh persetujuan.

- b. Independensi dan Objektivitas

Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus obyektif dalam melaksanakan tugasnya.

2. Standar Kinerja yaitu Standar yang mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Cakupan dari standar kinerja adalah:

a. Mengelola Aktivitas Audit Internal

Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

b. Sifat Dasar Pekerjaan Aktivitas

audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan evaluasi mereka memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan.

c. Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Rencana penugasan harus mempertimbangkan strategi organisasi, tujuan dan risiko-risiko yang relevan untuk penugasan itu.

d. Pelaksanaan Penugasan

Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan

e. Komunikasi

Hasil Penugasan Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya.

f. Pemantauan Perkembangan

Kepala audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

g. Komunikasi Penerimaan Risiko

Dalam hal Kepala audit internal menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung risiko yang tidak dapat ditanggung oleh organisasi, Kepala audit internal harus membahas masalah ini dengan manajemen senior. Jika Kepala audit internal meyakini bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka Kepala audit internal harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada dewan.

#### **2.1.4 Pelaksanaan Audit Internal**

Menurut **Internasional Standards for the Profesional Practice of Internal Auditing (2016)** standar atribut 2300 tentang pelaksanaan penugasan, adalah sebagai berikut:



2310 - Pengidentifikasian Informasi Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan.

2320 - Analisis dan Evaluasi Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang sesuai.

2330 - Pendokumentasian Informasi Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan dan berguna untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.

2340 - Supervisi Penugasan Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan staf tereduksi.

menurut **Hiro Tugiman (2006)**, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. audit internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.

b) Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

c) Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

d) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

## **2.2 Pengendalian Internal**

### **2.2.1 Definisi Pengendalian Internal**

Menurut **Committee Of Sponsoring Organization Study**, pengendalian internal adalah suatu proses dari aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian internal meliputi:

1. Berbagai kegiatan (*a process*)
2. Dipengaruhi oleh manusia (*is affected by people*)
3. Diharapkan dapat mencapai tujuan (*objectives*)

Sedangkan internal control berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan. (Sawyer, 2005)

Pengertian pengendalian intern menurut (Hery, 2013) adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa pengendalian internal adalah proses yang didalamnya terdapat prosedur, kebijakan, dan rencana-rencana untuk melindungi dan meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional perusahaan yang berkaitan

dengan asset dan kekayaan perusahaan yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya manajemen dan audit internal.

### **2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Pengendalian Internal**

Menurut **Wahyuni dan Ngumar (2013)** Pengendalian Internal adalah berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya yaitu:

- a. Menjaga aktiva perusahaan.
- b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.
- d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Ruang Lingkup tugas auditor internal yaitu menguji dan mengevaluasi kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian intern dan kualitas dari pelaksanaan tugas. Maka dapat disimpulkan bahwa demi tercapainya tujuan pengendalian internal, Ukuran pengendalian intern memadai atau tidak dapat diukur dengan kategori

- a) Efektivitas dan efisiensi kegiatan
- b) Realibilitas laporan keuangan atau informasi
- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.3 Konsep Dasar dan Komponen Pengendalian Internal**

Dalam Laporan **COSO** menekankan bahwa konsep dasar pengendalian internal dinyatakan dalam beberapa definisi berikut:

1. Pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses perkembangan akuntansi. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan kedalam, infrastruktur suatu entitas.
2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.
4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi. Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait.

Komponen pengendalian intern menurut **COSO** adalah:

### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajmene di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Pengendalian Intern dibagi kedalam:

- a) Pengendalian internal yang lebih menekankan pada tujuan perusahaan dan menghubungkan pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan yang meliputi produksi, transportasi, dan riset perusahaan.
- b) Pengendalian manajemen terdiri dari pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi yang

menekankan terhadap pengamanan aktiva perusahaan dengan melakukan pencatatan akuntansi memadai. Pengendalian manajemen ini harus dilakukan secara efektif dan efisien serta taat pada hukum yang berlaku.

## 2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pada tingkatan transaksi spesifik, pengendalian intern merujuk pada aksi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (mis. memastikan pembayaran terhadap pihak ketiga dilakukan terhadap suatu layanan yang benar-benar dilakukan). Prosedur pengendalian intern mengurangi variasi proses dan pada gilirannya memberikan hasil yang lebih dapat diperkirakan.

## 3. Prosedur Pengendalian (*Control Activities*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.
- b. Pelimpahan tanggung jawab.
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.

d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

#### 4. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktivitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi.



## 5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen. Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Selain itu, Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas operasional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organisasi).

### **2.2.4 Manfaat dan Keterbatasan Pengendalian Internal**

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.

Menurut **Arens (2009)** Manajemen dalam merancang struktur pengendalian intern mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Keandalan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Pengendalian internal yang baik tidak hanya menyediakan seperangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap peronal untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi contohnya adalah UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas.

Menurut **Sawyer (2005)** manfaat pengendalian yaitu

1. Kontrol menjadi sarana mengendalikan diri sendiri. Sarana kontrol tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan diri. Juga dapat digunakan untuk mendorong individu meningkatkan kinerja mereka dan tidak hanya puas dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Kontrol yang baik tidak hanya melindungi organisasi, tetapi juga karyawan. Manajemen bertanggung jawab secara moral bahwa tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Kebanyakan karyawan akan menghargai operasi yang dikendalikan dengan baik.
3. Manajer, sebagai agen dari pemilik, bertanggungjawab kepada pemilik. Mereka harus membuktikan bahwa mereka telah menggunakan sumber daya yang telah dipercaya kepada mereka dengan sebaik baiknya. Dengan melaksanakan kontrol, melalui laporan dan verifikasi yang objektif oleh auditor, pemilik bisa yakin bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer telah dilaksanakan dengan baik.

Menurut **Wahyuni dan Ngumar (2013)**, ada beberapa batasan-batasan pengendalian internal, antara lain sebagai berikut:

- a. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain, dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pertimbangan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
- b. Gangguan lain dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan.

- c. Kolusi. kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya kettidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
- d. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.
- e. Biaya vs manfaat. Biaya diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut.

## **2.3 Good Corporate Governance**

### **2.3.1 Definisi Good Corporate Governance**

GCG adalah “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah asing adalah *Good Corporate Governance*. Saat ini, maraknya skandal besar yang ada di republik ini disebabkan oleh Tata Kelola Perusahaan yang Buruk (*Bad Corporate Governance*). Maka penerapan GCG saat ini menjadi salah satu pedoman bagi perusahaan agar memperoleh tujuannya secara efektif dan efisien. Adapun beberapa pengertian dari GCG itu sendiri adalah:

Menurut **Forum for Corporate Governance in Indonesia FCGI (2006)** adalah

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan"

Sementara itu, menurut **Soekrisno Agoes (2006)**, Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah Sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. **Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno Agoes, 2006)** menjelaskan tatakelola perusahaan yang baik adalah "Mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Dimana hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

### **2.3.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Penerapan praktek GCG pada BUMN secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep – 117 / M – BUMN / 2002 tanggal 1 agustus 2002, dan beberapa pasal penting seperti berikut ini:

- 1) BUMN wajib menerapkan GCG secara Konsisten dan atau menjadikan GCG secara sebagai landasan operasionalnya.

- 2) Penerapan GCG pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi:

- a) Transparansi, yaitu ketrbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materii dan relevan mengenai perusahaan.
- b) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3.3 Manfaat dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance**

Penerapan *good corporate governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Dalam **Dwiridotjahjono (2009)**, berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *good corporate governance* antara lain:

1. Dengan penerapan *good corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
3. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah

membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai & Asaoka 2003; Balck et al., 2003).

4. *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou et al. (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (*earnings management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.
5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.
6. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan



dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.

7. Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
8. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.
9. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Menurut **Effendi (2009)**, tujuan penerapan GCG adalah

1. Memaksimalkan BUMN/BUMD dengan cara meningkatkan prinsip terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar

perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN/BUMD secara profesional, transparan, dan efisiensi, serta meningkatkan kemandirian organisasi.
3. Mendorong agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan, organisasi dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan termasuk kelestarian lingkungan disekitar BUMN/BUMD.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN/BUMD dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

#### **2.3.4 Kendala *Good Corporate Governance***

Menurut **Dwiridotjahjono (2009)**, Berikut ringkasan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan *good corporate governance* di Indonesia, yaitu:

- 1) Kendala Hukum.

*Corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan (*abuses*) oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap

tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Dalam sistem hukum kita mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan (*judiciary*) maka efektivitasnya menjadi terbatas. Begitu juga halnya dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka.

2) Kendala Budaya.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (*conformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang. Begitu juga halnya dengan adanya dan telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (*fraud*) maupun transaksi dengan orang dalam (*insider transactions*) hanyalah merupakan hal yang biasa

3) Kendala Politik.

Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur, terkadang diartikan

sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi (Prasetyantono dalam Nugroho dan Siahaan, 2005). Dalam beberapa kasus, hal ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi lain yang mungkin dapat menjadi perhatian adalah bahwa peranan lembaga pasar modal (Bapepam begitu juga JSX) sebagai lembaga pengatur masih belum cukup kuat dalam menutupi kelemahan yang ada di pengadilan.

#### 4) Kendala Lingkungan Bisnis.

Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan (meskipun berbentuk perseroan) Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga (*family-owned*). Dengan kondisi ini, maka praktik *corporate governance* dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga, misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal (*publicly listed*).

#### 5) Kendala Lainnya.

Bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediary keuangan yang amat berperan dalam penyediaan (juga membantu dalam menyediakan) dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana (pinjaman) bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam penggunaan dana. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi monitoring ini tidak berjalan secara efektif, bahkan hal itu sudah terjadi selama proses penilaian terhadap proposal pinjaman yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus disetujuinya proposal kredit yang tidak/kurang layak sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dalam pengembaliannya kemudian (kredit macet).

#### **2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sekarang, maka dapat disajikan dalam bentuk *table* sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Penelitian dan Referensi Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil penelitian
1.	Davittua pardede (2017)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (studi kasus pada PT POS Indonesia kota Bandung)	X <sub>1</sub> : Audit Internal X <sub>2</sub> : Pengendalian Internal Y: <i>Good corporate Governance</i>	X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> berpengaruh terhadap Y
2.	Bit Widiaji Pamungkas (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal, Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (studi kasus pada PT KAI kota Bandung)	X <sub>1</sub> : Audit Internal X <sub>2</sub> : Pengendalian Internal Y: <i>Good corporate Governance</i>	X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> berpengaruh terhadap Y
3.	Lucky Darmawan (2016)	Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (studi kasus pada BPR kota Bandung)	X: Audit Internal Y: <i>Good Corporate Governance</i>	X berpengaruh terhadap Y
4.	Dwiki Iskandar Muda (2015)	Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal, Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (studi kasus pada perusahaan BUMN industri strategis kota Bandung)	X <sub>1</sub> : Audit Internal X <sub>2</sub> : Pengendalian Internal Y: <i>Good corporate Governance</i>	X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> berpengaruh kuat terhadap Y

## 2.5 Kerangka Pemikiran

### 2.5.1 *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan

Pada era globalisasi saat ini, Daya saing menjadi faktor maha penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia. Adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2015 diharapkan dapat membantu Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi. mendorong negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan daya saing mereka. Bagi Indonesia, MEA dapat menjadi peluang sekaligus sebagai tantangan. Untuk Indonesia, tantangan saat ini salah satunya dalam sektor perbankan yang merupakan pendukung utama MEA dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi. adanya kekurangan dan keterbatasan dalam tantangan diterapkannya MEA membuat pemerintah harus siap untuk menghadapi berbagai hambatan ke depannya, dan tentunya bukan hanya dari pihak pemerintah tetapi dari pihak perusahaan sendiri. Salah satu hal yang harus dibenahi pada perusahaan-perusahaan saat ini untuk menghadapi persaingan ekonomi global adalah dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG).

Isu mengenai *corporate governance* (tata kelola perusahaan) telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan apabila tata kelola perusahaan perusahaan di Indonesia saat ini dilakukan secara baik dan sesuai dengan kebijakan, maka dapat mendukung pemerintah dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam hal keharmonisan sosial, stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi negara.

Penerapan GCG sendiri merupakan wujud komitmen perusahaan agar diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, berupa peningkatan kinerja dan penciptaan kinerja perusahaan yang baik. Namun saat ini, kinerja perbankan di Indonesia kurang karena adanya beberapa bank dengan pencapaian pertumbuhan kredit yang masih belum memenuhi target (Irwan, 2016). Salah satunya dalam pemberian kredit pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kredit investasi.

UMKM memiliki peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Namun dalam perkembangannya, UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Dan bank X merupakan salah satu jasa perbankan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bersinergi dalam pemberian pengelolaan pinjaman pada UMKM.

Dalam Masyarakat Ekonomi Asean, industri perbankan merupakan sekian dari banyak faktor yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi, salah satunya dalam bidang investasi. Dengan adanya penerapan GCG, perusahaan berkembang bukan dalam hal kinerja saja tetapi dapat menguntungkan pihak lain seperti investor. Hal ini karena dari pengertian GCG itu sendiri menurut **Soekrisno Agoes (2006)**, yaitu

“Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah Sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.”

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja begitu penting bagi perusahaan, maka agar kegiatan operasi dapat berjalan dengan efektif



dan efisien diperlukanlah suatu penerapan *good corporate governance*. Adapun manfaat yang terkait dengan pemikiran diatas menurut **Dwiridotjahjono (2009)** yaitu:

1. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif
2. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.

### **2.5.2 Hubungan Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap *Good Corporate Governance***

Dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, sangatlah penting bila pencapaian suatu tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Untuk menghindari tata kelola yang buruk, audit internal dibutuhkan untuk

membantu manajemen dalam menjalankan setiap kegiatan operasional. Hal ini disampaikan dalam **IFFP (2009)** disebutkan bahwa

*“The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management, and control processes using a systematic and disciplined approach”*

Berdasarkan definisi diatas, audit internal mengevaluasi dan berkontribusi dalam meningkatkan nilai tata kelola, risiko manajemen dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.

audit internal juga dapat membantu perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *corporate governance* karena sifat audit internal yang independen dan objektif dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Adapun fungsi audit internal terhadap GCG Menurut **IFFP (2009)** yaitu Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

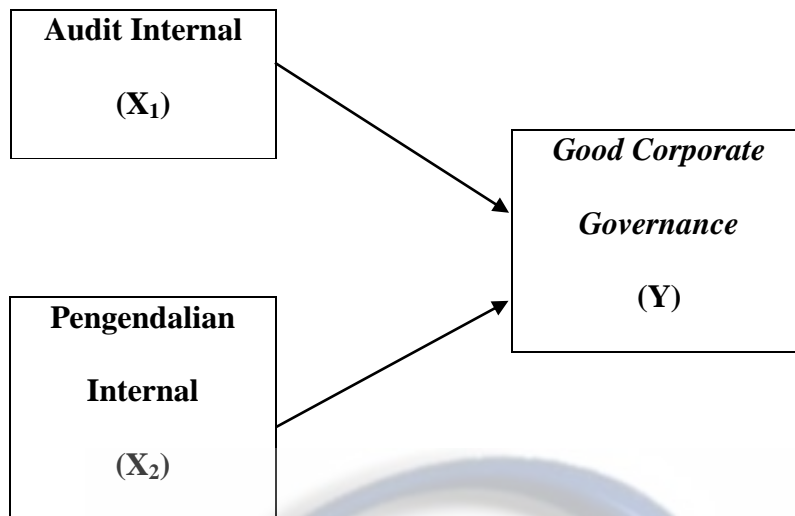
- a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.
- b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
- c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat dalam organisasi.

- d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawasan, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Dengan menerapkannya *good corporate governance*, maka dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal sendiri ada untuk meningkatkan nilai operasional perusahaan yang didasarkan pada kebijakan, prosedur, rencana-rencana yang sistematis agar dapat meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan.

Pengendalian internal dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. adanya pengendalian, menjamin kebijakan dan pengarahannya – pengarahannya manajemen perusahaan menjadi cukup memadai. Beragam teknik pengendalian diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan serta untuk mengatur aktivitas yang menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dituangkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut **Uma Sekaran (2011)** hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan uraian gambar 2.1 tentang keterkaitan antara audit internal dan pengendalian internal terhadap *good corporate governance* diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Audit Internal dan Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial terhadap

*Good Corporate Governance*.

H<sub>2</sub> : Audit Internal dan Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap *Good Corporate Governance*.